

POLICY BRIEF

**SOLUSI DALAM MENGATASI KEMACETAN
LALU LINTAS DI WILAYAH PERKOTAAN
DKI JAKARTA**

Novie Hasta Wahyudi
Dr. Izzatusholekha, M.Si
Dr. Maya Puspita Dewi, M.Si



RINGKASAN EKSEKUTIF

Policy brief berikut merupakan sebuah rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk memberikan solusi dalam mengatasi kemacetan lalu lintas di wilayah perkotaan DKI Jakarta. Sebagai ibukota negara, DKI Jakarta seharusnya menjadi sebuah kota yang indah, bersih, teratur, nyaman, dan tertib. Namun, kenyataannya, Jakarta sebagai kota metropolitan memiliki ciri khas kota besar dengan segala kerumitannya, yaitu lalu lintas yang sibuk, jumlah penduduk yang besar, pembangunan bangunan dan pusat perbelanjaan yang pesat, serta beragam aktivitas lain yang berujung pada kemacetan. Kemacetan lalu lintas saat ini menjadi persoalan utama yang dihadapi DKI Jakarta, mengakibatkan dampak signifikan terhadap mobilitas, lingkungan, dan ekonomi. Kepadatan lalu lintas telah menjadi masalah kronis yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga dan produktivitas kota. Faktor penyebab kemacetan termasuk peningkatan jumlah kendaraan pribadi, kekurangan infrastruktur yang memadai, kurangnya sistem transportasi publik yang efisien, serta perilaku pengemudi yang kurang patuh terhadap aturan. Kemacetan di Jakarta mencerminkan kesulitan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam mengantisipasi pertumbuhan populasi, pembangunan kota, dan lonjakan jumlah kendaraan yang semakin cepat, sehingga layanan transportasi yang memadai tidak dapat diwujudkan dengan baik. Padahal, sistem transportasi merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kestabilan ekonomi suatu wilayah.

PENDAHULUAN

Provinsi DKI Jakarta, sebagai pusat ibu kota Indonesia, berperan sebagai pusat kegiatan ekonomi, politik, dan kebudayaan, serta diakui sebagai kota Mega Urban. Sebagai pusat aktivitas ekonomi, Jakarta menjadi daya tarik penduduk dari desa-desa untuk berpindah dalam jumlah yang besar, dan mencari peluang pekerjaan yang lebih baik. Kota ini telah merayakan ulang tahunnya yang ke-496 pada tanggal 22 Juni 2023. Kondisi tanah dan luas wilayah yang tetap dengan kepadatan penduduk yang mencapai 11,24 juta orang, yang semakin diperparah dengan peningkatan volume kendaraan setiap tahunnya. Hal ini menjadi akar dari masalah kemacetan yang masih belum terselesaikan di Kota Jakarta.

Menurut data dari BPS DKI Jakarta, selama periode 2018 hingga 2022, terjadi pertumbuhan rata-rata sebesar 4,1 persen per tahun dalam jumlah kendaraan bermotor di Jakarta. Pada awal pandemi, pertumbuhan unit kendaraan baru mengalami penurunan signifikan, mencapai 1,7 persen. Namun, pada tahun 2021 dan 2022, terjadi peningkatan jumlah kendaraan dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 4,1 persen dan 4,4 persen setiap tahunnya. Pada tahun 2022, jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar mencapai 26,4 juta unit di Jakarta. Rinciannya adalah sebanyak 17,3 juta sepeda motor, 3,8 juta mobil penumpang, dan sisanya sekitar 5 juta unit yang terdiri dari bus dan truk (Sari et al., 2020).

Kemacetan di Jakarta telah menjadi sebuah permasalahan yang tidak hanya mempengaruhi penduduk Jakarta, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Dalam perbandingan dengan kota-kota besar di negara maju, terdapat ironi dalam sistem layanan angkutan umum di negara kita yang masih tertinggal dan mengkhawatirkan. Di negara maju, masyarakat cenderung menggunakan angkutan umum sebagai pilihan utama daripada menggunakan kendaraan pribadi. Namun, di Jakarta, mayoritas masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi dibandingkan angkutan umum dengan berbagai alasan seperti ketidaknyamanan, waktu tempuh yang lebih lama, pengoperasian angkutan umum yang belum optimal sehingga keamanan perjalanan terganggu, dan alasan lainnya. Hal ini menjadi sebuah tantangan besar dalam mempromosikan penggunaan angkutan umum yang efisien dan nyaman di Kota Jakarta (Sitorus, 2013).

Kemacetan lalu lintas di Kota Jakarta disebabkan oleh volume lalu lintas yang sangat tinggi, yang melibatkan baik lalu lintas regional maupun lokal. Fenomena kemacetan merupakan kejadian harian yang dirasakan oleh penduduk kota, dan berdampak serius pada ketidakefisienan penggunaan sumber daya serta mengganggu berbagai kegiatan di sekitarnya, bahkan menghambat kelancaran aktivitas sosial ekonomi kota (Ratnaningtyas et al., 2021). Menurut (Sitanggang & Saribanon, 2018), faktor-faktor yang menyebabkan kemacetan di jalan raya meliputi jumlah kendaraan bermotor yang banyak, aktivitas pejalan kaki atau perlintasan jalan, perilaku pengemudi angkutan umum yang sering berhenti sembarangan untuk mengambil penumpang, serta kompleksitas persimpangan jalan yang tidak teratur. Hal ini merupakan faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap kemacetan lalu lintas yang terus terjadi di Jakarta.

(LANJUTAN)... PENDAHULUAN

Kemacetan lalu lintas di Kota Jakarta sering kali memiliki dampak negatif, seperti peningkatan waktu perjalanan, konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi, emisi polusi udara yang meningkat, dan frustrasi bagi pengemudi. Untuk mengatasi kemacetan, sering diperlukan langkah-langkah seperti perencanaan transportasi yang baik, pengelolaan lalu lintas yang efektif, pengembangan infrastruktur jalan yang memadai, dan promosi penggunaan transportasi umum (Sitorus, 2013).

Dengan demikian jelas diperlukan adanya suatu kebijakan yang terpadu yang dirumuskan secara komprehensif dalam mengatasi masalah transportasi di Kota Jakarta. Hal ini perlu dilakukan melalui proses yang terstruktur dan bertahap untuk membenahi sistem transportasi yang ada. Kebijakan semacam ini harus mencakup berbagai aspek, termasuk infrastruktur, regulasi, sistem angkutan umum, pengelolaan lalu lintas, dan dukungan terhadap berbagai inisiatif yang berfokus pada transportasi berkelanjutan.

Pendekatan yang terstruktur dan terpadu akan memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi secara lebih efektif permasalahan yang ada, menetapkan prioritas, serta menyusun rencana tindakan yang terarah. Pentahapan dalam implementasi kebijakan transportasi yang komprehensif akan memungkinkan pemecahan masalah secara bertahap, memperhatikan dampak dari setiap langkah kebijakan yang diambil, dan memungkinkan adaptasi serta penyesuaian seiring waktu.

Saat dirumuskan secara komprehensif, adanya kebijakan yang tepat diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih berkelanjutan, meminimalisir kemacetan, meningkatkan efisiensi transportasi, meningkatkan kualitas layanan angkutan umum, serta mereduksi dampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat Jakarta secara umum.



DESKRIPSI MASALAH

Kemacetan merupakan masalah kompleks yang muncul seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk. Dalam konteks ini, kemacetan lalu lintas tidak hanya disebabkan oleh volume kendaraan yang meningkat, melainkan juga oleh ketidaksempurnaan sistem tata kota. Kemacetan lalu lintas diakui sebagai tantangan klasik utama yang harus diatasi untuk mencapai konsep kehidupan yang makmur (Ratnaningtyas et al., 2021).

Pertumbuhan Kota Jakarta sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh kota-kota satelit di sekitarnya. Namun, dengan peningkatan jumlah penduduk, kompleksitas masalah kemacetan semakin meningkat karena sulitnya memprediksi jumlah dan dinamika pergerakan manusia. Tingginya arus masuk pelaku perjalanan dari kota-kota satelit ke Jakarta menjadi penyebab signifikan dari kemacetan di kota tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, langkah awal yang dapat diambil adalah mengubah kebiasaan dan gaya hidup masyarakat Jakarta beserta kota-kota satelitnya. Salah satunya adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan beralih ke moda transportasi massa atau umum (Sitorus, 2013). Hal ini diharapkan dapat membantu mengurangi beban lalu lintas dan meredakan tingkat kemacetan di Jakarta serta meningkatkan efisiensi pergerakan penduduk dalam kawasan tersebut.

Dapat diakui bahwa tantangan utama di kota besar terletak pada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan infrastruktur guna mengantisipasi laju urbanisasi yang sangat cepat (Ramdhani Harahap, 2013). Beberapa faktor yang menyumbang terhadap masalah kemacetan lalu lintas melibatkan kurangnya kualitas layanan moda transportasi umum, perilaku buruk pengemudi, kurangnya pemeliharaan kendaraan, jadwal perjalanan yang tidak dapat diandalkan, peningkatan jumlah kendaraan bermotor, pertumbuhan urbanisasi yang pesat, infrastruktur jalan yang tidak memadai, fasilitas pendukung jalan yang kurang mendukung, dan kurangnya ketertiban dalam perilaku pengguna jalan dan lalu lintas. Selain itu, rendahnya ketaatan terhadap peraturan, seperti kurangnya kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM), dan kurangnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas juga turut berkontribusi pada masalah ini. Terakhir, ketidaktundukan terhadap peraturan pemerintah daerah, khususnya terkait dengan penggunaan sarana umum, menjadi faktor penting yang memperumit situasi.

(LANJUTAN)... DESKRIPSI MASALAH

DKI Jakarta merupakan salah satu kota terpadat di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Tingginya jumlah penduduk ini menciptakan permintaan akan transportasi yang tinggi, menyebabkan lalu lintas yang padat. Meskipun terdapat beberapa sistem transportasi publik seperti Transjakarta, KRL, dan angkutan umum lainnya, namun kapasitas dan cakupannya belum cukup untuk mengakomodasi kebutuhan penduduk secara efisien. Pertumbuhan kota yang cepat telah menyebabkan keterbatasan ruang untuk jalan dan kendaraan. Pembatasan ruang hijau juga mengurangi area untuk pengembangan jalan baru atau jalur alternatif.

Kemacetan lalu lintas merupakan masalah yang paling mencolok dan berdampak ekstrim di Kota Jakarta saat ini. Kemacetan tersebut merugikan banyak pihak, mengganggu mobilitas harian, memperlambat aktivitas ekonomi, dan mempengaruhi kualitas hidup penduduk kota Jakarta secara umum. Penyelesaian masalah ini memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan banyak aspek, mulai dari peningkatan infrastruktur, peningkatan pelayanan angkutan umum yang efisien, hingga pengaturan lalu lintas yang lebih baik, serta kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap aturan lalu lintas (Hikmah & Cahyoko, 2012).

Kemacetan lalu lintas memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jakarta. Kemacetan mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi karena menghambat mobilitas dan kelancaran arus barang serta jasa. Biaya transportasi barang dan jasa juga menjadi lebih tinggi karena kendaraan tidak dapat mencapai tujuan dengan tepat waktu, sehingga memengaruhi efisiensi pengiriman dan memperbesar biaya operasional (Sidjabat, 2015). Selain itu, kemacetan lalu lintas juga berdampak pada produktivitas pekerja. Para pekerja yang harus menghadapi kemacetan dalam perjalanan mereka menuju tempat kerja akan merasakan kelelahan yang lebih dan bisa mempengaruhi kinerja mereka saat tiba di tempat kerja. Ini dapat menyebabkan penurunan produktivitas karena kelelahan fisik dan mental yang terkait dengan kondisi lalu lintas yang buruk.

Oleh karena itu, pengelolaan masalah kemacetan lalu lintas bukan hanya penting untuk meningkatkan mobilitas dan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap aspek ekonomi, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas di wilayah perkotaan DKI Jakarta. Adapun rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan adalah sebagai berikut:

1. Transportasi Publik yang Efisien

- Peningkatan jaringan dan kualitas transportasi publik seperti bus, MRT, LRT, dan KRL;
- Pengembangan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki;
- Penyediaan parkir yang strategis di stasiun transportasi publik untuk mendorong penggunaan transportasi massal.

2. Pembatasan Kendaraan Pribadi

- Pemberlakuan kebijakan ganjil-genap atau sistem plat nomor genap/ganjil untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan pada hari-hari tertentu;
- Pengaturan tarif tol berdasarkan jam sibuk untuk mendorong redistribusi waktu perjalanan.

3. Kontrol Kendaraan Bermotor

- Pengawasan ketat terhadap kendaraan yang tidak layak jalan atau tidak memenuhi standar emisi;
- Promosi penggunaan kendaraan listrik.

4. Peningkatan Infrastruktur Jalan

- Perbaikan dan pengembangan infrastruktur jalan yang memadai;
- Penyediaan jalur khusus atau lajur cepat untuk transportasi publik;
- Implementasi sistem manajemen lalu lintas cerdas, termasuk pemantauan lalu lintas dan penyesuaian sinyal secara dinamis.

5. Promosi Transportasi Berkelanjutan

- Insentif untuk penggunaan transportasi berkelanjutan, seperti memberikan insentif pajak untuk mobil ramah lingkungan;
- Program penyewaan sepeda umum atau skuter listrik yang terjangkau.

6. Kebijakan Pembatasan Zona

- Pembatasan zona dengan memberlakukan kebijakan kendaraan hanya boleh masuk ke zona tertentu berdasarkan jenis kendaraan atau tujuan perjalanan.

7. Ruang Publik yang Ramah

- Pengembangan ruang publik yang ramah pejalan kaki, termasuk taman dan area rekreasi, untuk mendorong orang untuk berjalan kaki dan menggunakan transportasi berkelanjutan.

(LANJUTAN)... REKOMENDASI KEBIJAKAN

8. Peningkatan Kapasitas Transportasi Massal

- Ekspansi dan peningkatan kapasitas sistem transportasi massal seperti MRT, LRT dan KRL untuk mengakomodasi pertumbuhan jumlah penduduk maupun mobilitas masyarakat;
- Perpanjangan jalur dan layanan MRT sampai dengan Jakarta Kota

Tabel 1
Jumlah Penumpang KRL & MRT Jakarta

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023 Smstr I
1	KRL Jabodetabek	Penumpang	334.102.903	154.592.896	126.588.384	217.964.892	135.793.399
2	MRT Jakarta		23.637.960	9.929.981	9.929.981	19.813.046	15.118.472
3	LRT Jakarta (Velodrome-Kelapa Gading)		145.897	486.654	314.189	685.248	462.415
4	KA Bandara Soekarno Hatta		1.492.407	543.927	216.375	926.608	844.700

Sumber: Statistik Kementerian Perhubungan

Dari tabel tersebut di atas, dapat kita ketahui bahwa jumlah penumpang tertinggi adalah angkutan KRL jabodetabek dan selanjutnya adalah MRT Jakarta. Hal ini perlu didorong dengan pengembangan/perpanjangan layanan maupun penambahan kapasitas maupun headway terutama pada jam sibuk sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat pengguna kendaraan pribadi/mobil untuk beralih ke transportasi kereta sehingga kemacetan berkurang.

9. Peningkatan Keamanan Pejalan Kaki dan Sepeda

- Pembangunan trotoar yang aman dan nyaman untuk pejalan kaki;
- Peningkatan infrastruktur sepeda, termasuk jalur sepeda yang terpisah dari jalan raya.

10. Penataan Ruang Kota yang Terencana

- Penerapan perencanaan tata ruang yang terencana dengan baik untuk mengurangi kepadatan di pusat kota dan mendorong pengembangan di daerah pinggiran kota.

(LANJUTAN)... REKOMENDASI KEBIJAKAN

11. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

- Kampanye edukasi untuk mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan transportasi publik dan transportasi berkelanjutan;
- Sosialisasi aturan lalu lintas dan pentingnya tertib berlalu lintas.

12. Kolaborasi dengan Swasta

- Kerjasama dengan perusahaan swasta untuk menyediakan solusi transportasi inovatif seperti layanan ridesharing berbagi atau penyewaan sepeda listrik.

13. Kolaborasi antar Stakeholder

- Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam perencanaan dan implementasi kebijakan lalu lintas;

Penerapan sejumlah kombinasi kebijakan ini harus melibatkan partisipasi dan dukungan aktif dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta agar dapat membantu mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas di wilayah perkotaan DKI Jakarta secara efektif, serta penting untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus untuk memastikan keefektifan dan keberlanjutan dari berbagai upaya tersebut. Kombinasi strategi ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas, meningkatkan kualitas udara, serta mendorong perubahan menuju sistem transportasi yang lebih berkelanjutan di wilayah perkotaan DKI Jakarta.

Policy Brief ini dapat menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan di tingkat Provinsi DKI Jakarta ataupun di tingkat nasional yang memerlukan koordinasi antar Pemerintah Daerah atau antar Kementerian sehingga harmonisasi dan kolaborasi dalam penanganan masalah transportasi di Jakarta dapat teratasi termasuk rekomendasi kebijakan yang dapat menarik minat atau mempermudah peluang investasi atau kerjasama dengan pihak swasta.



DAFTAR PUSTAKA

- Hikmah, M., & Cahyoko, H. (2012). Manajemen Transportasi di DKI Jakarta. <http://ezzelhague.multiply.com/joumallitem/5>
- Ramdhani Harahap, F. (2013). Dampak Urbanisasi bagi Perkembangan Kota di Indonesia. In *Jurnal Society: Vol. I (Issue 1)*.
- Ratnaningtyas, H., Nurbaeti, Asmaniati, F., & Desafitri Ratu Bilqis, L. (2021). Berwisata ke Kota Jakarta dengan Kemacetannya. *JMPP*, 4(2).
- Sari, R. I., Fitria, L., & Firmansyah, A. (2020). Isu Kebijakan Baru ERP (Electronic Road Pricing) Dalam Mengatasi Permasalahan Kemacetan di Provinsi DKI Jakarta.
- Sidjabat, S. (2015). Revitalisasi Angkutan Umum untuk Mengurangi Kemacetan Jakarta.
- Sitanggang, R., & Saribanon, E. (2018). Faktor-faktor Penyebab Kemacetan di DKI Jakarta.
- Sitorus, B. (2013). Kajian Pembenahan Angkutan Massal untuk Mengurangi Kemacetan Lalu Lintas di DKI Jakarta.